



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA**

NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2022**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa agar pembentukan Peraturan Daerah dapat disusun secara terencana, terpadu dan sistematis dengan mempertimbangkan/memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah dan untuk menjaga agar Peraturan Daerah tersebut tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional, maka perencanaan penyusunan Peraturan Daerah harus dilakukan dalam suatu Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2022.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Walikota Surabaya Nomor : 188.34/9257/436.1.2/2021 tanggal 13 Agustus 2021 Perihal : Penyampaian Daftar Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2021;
 2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 172/5251/436.5/2021 tanggal 10 Agustus 2021 Perihal : Pemberitahuan;
 3. Surat Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 255/Kom A/Eks/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 Perihal : Usulan Judul Raperda Prakarsa Komisi A;
 4. Surat Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 41/KomisiB/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 Perihal : Usulan Judul Raperda;
 5. Surat Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 169/Kom.C/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 Perihal : Usulan Rancangan Peraturan Daerah;
 6. Surat Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 53/Komisi.D/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 Perihal : Usulan Rancangan Peraturan Daerah;
 7. Surat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 28/BPP/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 perihal Pengajuan Judul Raperda Usul Prakarsa DPRD Kota Surabaya;
 8. Berita Acara Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya bersama Bagian Hukum Kota Surabaya tanggal 11 Oktober 2021;
 9. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya tanggal 1 November 2022;
 10. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 188/25313/013.2/2021 tanggal 26 Oktober 2022 Perihal : Penyampaian Hasil Konsultasi terkait Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 11. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya tanggal 3 November 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022.**
- KESATU** : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2022;
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dituangkan dalam Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini;
- KETIGA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 November 2021

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA,

Ttd.

D. ADI SUTARWIJONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt.SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA



Mutafid Rachman, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660111 199602 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD SURABAYA

NOMOR : 53 TAHUN 2021

TANGGAL : 3 NOVEMBER 2021

A. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA DPRD KOTA SURABAYA TAHUN 2022

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		Perangkat Daerah/ Unit kerja/ Pemrakarsa	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskahak ademik	Penjelasan atauKetera ngan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pengembangan Kampung Cerdas di Kota Surabaya	Mencakup 6 Pilar utama : 1. Smart governance; 2. Smart branding; 3. Smart economy; 4. Smart living; 5. Smart society; 6. Smart environment						1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 2. Dinas Pendidikan; 3. Bagian Hukum dan Kerjasama;	Komisi A
2.	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya	Pengelolaan Perusahaan Daerah Pasar Surya, Permodalan						1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 2. Badan Pendapatan Daerah. 3. Badan Pengelolaan	Komisi B

								Keuangan dan Aset Daerah; 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5. Bagian Hukum dan Kerjasama.	
3. Pengendalian dan Penanggulangan Banjir		Kebijakan yang mengatur pengendalian banjir di Kota Surabaya						1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 2. Dinas Sosial; 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 5. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga; 6. Bagian Hukum dan Kerjasama.	Komisi C

4.	Perubahan Perda No. 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	Memajukan pendidikan di Kota Surabaya				1. Bagian Hukum dan Kerjasama; 2. Dinas Pendidikan	Komisi D
5.	Hunian Yang Layak	Terkait Bangunan pada penyediaan Rumah Susun				1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; 3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan; 4. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga; 5. Bagian Hukum dan Kerjasama; 6. Dinas Sosial; 7. Dinas Lingkungan Hidup.	BPP
6.	Pemajuan Kebudayaan,	Mengatur, menguatkan dan				1. Dinas Kebudayaan,	BPP

	Kejuangan dan Kephlawanan Kota Surabaya	mengembangkan spirit						<p>1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan</p> <p>2. Badan Pendapatan Daerah;</p> <p>3. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga,</p>	Komisi A
7.	Perubahan Perda No. 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame	Penataan Reklame, Jaminan Bongkar, pelayanan perijinan penyelenggaraan reklame di Kota Surabaya	V					<p>1. Badan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan</p> <p>2. Badan Pendapatan Daerah;</p> <p>3. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga,</p>	Komisi A
8.	Pengelolaan Rusun, Apartemen, dan Kondominium	Pengelolaan Rumah Susun Komersial di Kota Surabaya	V					<p>1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;</p> <p>2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;</p> <p>3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;</p>	Komisi C

								4. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga; 5. Bagian Hukum dan Kerjasama; 6. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan.	
9.	Ketenagakerjaan	Perlindungan Tenaga Kerja di Surabaya dan mewajibkan setiap perusahaan yang ada di Surabaya memperkerjakan Tenaga kerja lokal Surabaya	V					1. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; 2. Bagian Hukum dan Kerjasama.	Komisi D
10.	Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pada Kawasan Industri Perdagangan, Perumahan, dan Permukiman	Pengelolaan Fasilitas Umum	V					1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	Komisi A

									Permukiman serta Pertanian.	
11.	Jasa Kontruksi	Pembangunan Kontruksi di Kota Surabaya	V						<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanian; 4. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga; 5. Bagian Hukum dan Kerjasama; 6. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan; 	Komisi C
12.	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Menanggulangi Kemiskinan yang ada di Kota Surabaya	V						<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Sosial; 2. Bagian Hukum dan Kerjasama 	Komisi D

13.	Pembentukan Produk Hukum Daerah	Produk Hukum Daerah di Kota Surabaya						Bagian Hukum dan Kerjasama	BPP
14.	Jjin Penyelenggaraan Rumah Hiburan Umum (RHU)	Penyelenggaraan Rumah Hiburan Umum	V					1. Dinas Kebudayaan, Kemudahan dan Olah Raga serta Pariwisata; 2. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.	BPP
15.	Pengelolaan Sampah Medis	Pengelolaan Sampah Medis	V					1. Dinas Kesehatan; 2. Dinas Lingkungan Hidup; 3. Rumah Sakit Umum Daerah.	BPP
16.	Ekonomi Kreatif	Ekonomi Kreatif	V					1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan 2. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan	Komisi B

							<p>Keluarga Berencana; 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.</p>	
17.	Penyelenggaraan Angkutan Publik	Penyelenggaraan Angkutan Publik	V				<p>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; 2. Dinas Perhubungan.</p>	Komisi C
18.	Kepemudaan	Kepemudaan					<p>3. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata 4. Dinas Pendidikan.</p>	Komisi D
19.	Pelayanan Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pelayanan Bidang Perdagangan dan Perindustrian	V		V		<p>1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan; 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,</p>	Komisi B

								<ul style="list-style-type: none"> 3. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam. 	
20.	Sistem Kesehatan Daerah	Sistem Kesehatan Daerah	V		V			<ul style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; 2. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. 	Komisi D
21.	Tempat Hunian Berimbang	Tempat Hunian Berimbang		V				<ul style="list-style-type: none"> 1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 	

								Permukiman serta Pertanian.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--

B. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH USULAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		Perangkat Daerah/ Unit kerja/ Pemrakarsa	KETTERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal	Penambahan objek retribusi dan penyesuaian tarif		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	Dinas Perhubungan	
2.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Penyesuaian tarif Retribusi		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	Dinas Perhubungan	
3.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan	Penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu		V	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		V	Dinas Perhubungan	

	Lintas dan Angkutan Jalan		V	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan		V	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
4.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Penambahan objek retribusi pelayanan tera/tera ulang						

					Perlengkapannya; 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal				
5.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah	Penyesuaian substansi terkait pengelolaan tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus, tempat pengabuan (krematorium) dan penyelenggaraan pemakaman jenazah	V	-			V	1. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga; dan 2. Dinas Lingkungan Hidup	
6.	Taman Hutan Raya	Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya	V	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana	V		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		

					telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah				
7.	Peternakan dan Kesehatan Hewan	Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kota Surabaya	V		Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/PERMENTAN/PK.350/5/2017 tentang Obat Hewan	V		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
8.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034	Revisi 5 tahunan terhadap arahan rencana pola ruang dan struktur ruang utama Kota Surabaya yang dilengkapi dengan arahan peraturan zonasi	V		Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peningjauan Kembali Rencana	V		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	

				Tata Ruang Wilayah untuk dilakukan peninjauan kembali RTRW paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun				
9.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Penyempurnaan dan Penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	V		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
10.	Bangunan	Penyempurnaan dan Penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang	V	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan	V		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	

		Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung			Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung			
11.	Pengelolaan Cagar Budaya	Pengelolaan Cagar Budaya di Kota Surabaya	V		Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	V		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
12.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Penambahan jenis/obyek dan penyesuaian tarif pelayanan kesehatan di unit kerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	Dinas Kesehatan
13.	Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba	Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Surabaya	V		Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	V		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
14.	Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Mencabut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang	V		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	V		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian

		Penyelenggaraan Perlindungan Anak			sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014		Penduduk dan Keluarga Berencana	
15.	Pembentukan PT. Surabaya Hebat (PERSERODA) Kota Surabaya	Pembentukan PT. Surabaya Hebat (PERSERODA) Kota Surabaya	V		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	V	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	

4. Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka akibat perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Perda ditetapkan.	-	-	-	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---

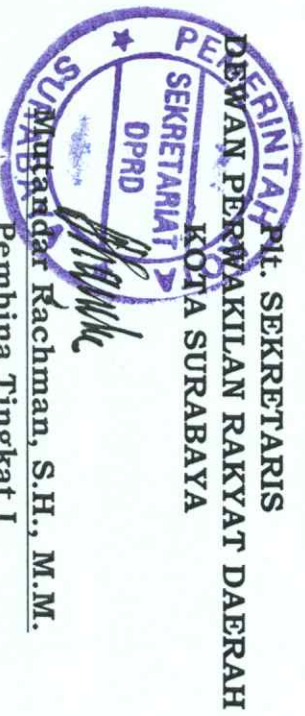
Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 November 2021

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA,

Ttd.

D. ADI SUTARWIJONO

Salinan sesuai dengan aslinya,



Pradharachman, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660111 199602 1 002